

NEWS

Kasdim Kebumen Dorong Tata Kelola Desa Transparan Jelang Pilkada Serentak 2027

Agung widodo - KEBUMEN.TNIAD.NET

Jul 22, 2026 - 08:10



Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen, Selasa (21/7/2026).

[KEBUMEN](#)- Penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi sorotan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kebumen, Selasa (21/7/2026). Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi berbagai pihak untuk memastikan

penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan efektif, transparan, dan berintegritas.

Kasdim 0709/Kebumen Mayor Inf Rokhyani turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Desmeli Lantai 2 Dinas PMD Kabupaten Kebumen. Forum bertema “Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Lingkungan Kabupaten Kebumen” itu diikuti sekitar 60 peserta dari unsur pemerintah daerah, TNI, pemerintah desa, akademisi, organisasi kemasyarakatan, hingga media massa.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen Drs. Budhi Suwanto, M.Si., menyebut FKP menjadi forum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa. Sejumlah agenda strategis turut dibahas, termasuk persiapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2027.

Kasdim 0709/Kebumen Mayor Inf Rokhyani menegaskan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar pemerintahan desa mampu berjalan efektif dan mendapat kepercayaan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tegas Mayor Inf Rokhyani.

Ia juga mengingatkan agar seluruh tahapan pengisian anggota BPD maupun Pilkades Serentak 2027 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip netralitas, kejujuran, transparansi, dan musyawarah dinilai penting untuk menjaga proses demokrasi di tingkat desa tetap berjalan dengan baik.

Selain itu, aparatur pemerintah desa diingatkan untuk menjaga integritas, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta mengelola anggaran secara akuntabel. Tata kelola yang bersih dinilai menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Kodim 0709/Kebumen menyatakan siap mendukung Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendampingi pembangunan desa. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang semakin profesional, transparan, dan berkualitas.

Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 tersebut menjadi momentum memperkuat komitmen bersama menuju tata kelola desa yang lebih baik, terutama dalam menghadapi agenda strategis pemerintahan dan demokrasi desa di Kabupaten Kebumen.

(Pendim0709)